



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 DAN
PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2009**

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati,

- Saudara Ketua, Saudara-Saudara Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- Rekan-Rekan Anggota Muspida;
- Saudara-Saudara Kepala Kantor Wilayah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pimpinan BUMN dan BUMD;
- Saudara-Saudara Pimpinan Partai Politik, serta Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, saya selaku Gubernur Kalimantan Barat sekaligus selaku Pimpinan Eksekutif mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan Tahun 1429 H kepada Umat Muslim Kalimantan Barat, semoga ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua berada dalam keadaan sehat wal'afiat, sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat guna mendengarkan Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, yang selanjutnya dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2008 serta Penetapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009.

Mudah-mudahan, kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kita, dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang telah banyak mencurahkan energi dan pikiran, yang meskipun dalam keadaan berpuasa, namun tetap banyak memberikan saran, tanggapan dan koreksi, terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2008 ini, sehingga menghasilkan komitmen bersama, berupa persetujuan untuk penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, dan sekaligus Penetapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009, yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Hadirin peserta sidang yang saya hormati.

Mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dapat saya informasikan, bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, dan Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Perubahan anggaran ini, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati, tetapi lebih merupakan penguatan, terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Dengan demikian, perubahan anggaran ini hanya berupa penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah, dan rencana penyesuaian atau penambahan alokasi dana, pada kegiatan-kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak mampu terdukung secara optimal, serta penganggaran beberapa kegiatan dan program baru, yang tidak dapat diakomodir pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2008, dikarenakan keterbatasan pembiayaan.

Dengan kata lain, kebijakan, strategi, prioritas program serta kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, tetap ditujukan pada proses penanganan masalah-masalah pembangunan, yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah, sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008, yang telah dijabarkan lebih lanjut, dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2008.

Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan hasil pembahasan, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, khususnya kepada para hadirin yang tidak terlibat langsung, dalam proses penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut:

- a. Dalam Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2008, pendapatan Daerah, diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 1.343,92 trilyun, yang berarti meningkat sebesar Rp.54,71 milyar atau 4,24 % apabila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan Daerah dalam APBD murni Tahun Anggaran 2008, yang ditargetkan sebesar Rp. 1.289,20 trilyun.

Perkiraan peningkatan pendapatan tersebut, didasarkan atas proyeksi peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD ini diproyeksikan sebesar Rp.461,90 milyar, meningkat sebesar Rp.23,38 milyar atau 5,33 % dari anggaran semula, sebesar Rp.438,51 milyar, Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp.10,42 milyar, atau 1,23 % dari anggaran semula sebesar Rp.847,68 milyar, menjadi sebesar Rp.858,11 milyar.
- c. Rencana pendapatan tersebut di atas, tidak termasuk rencana alokasi pendapatan, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Lalu, sebesar Rp.134,25 milyar, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu, merupakan komponen penerimaan, dalam Bagian Pembiayaan Daerah, untuk menutup defisit anggaran Daerah.

Hadirin sidang yang saya hormati.

Dari sisi anggaran belanja Daerah, maka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, dalam secara keseluruhan plafond anggaran belanja meningkat sebesar Rp.154,84 milyar, atau 11,89 % dari anggaran semula sebesar Rp.1.301,82 trilyun, menjadi sebesar Rp.1.456,53 trilyun.

Dari total anggaran belanja tersebut, maka alokasi dan distribusi anggaran, untuk Belanja Tidak Langsung, menjadi sebesar Rp.602,01 milyar, atau 41,33 % dan alokasi anggaran Belanja Langsung, menjadi sebesar Rp.854,65 milyar atau 58,67 %.

Hadirin, peserta sidang yang saya muliakan.

Dari totalitas rencana Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana saya utarakan di atas, maka terjadi selisih kurang, antara rencana Pendapatan dengan rencana Belanja Daerah, dalam Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2008, sebesar Rp.112,75 milyar. Selisih kurang tersebut merupakan defisit anggaran, dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2008 (setelah Perubahan APBD). Defisit anggaran tersebut, ditutup dari Penerimaan Pembiayaan, yaitu penerimaan yang berasal dan komponen penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu, sebesar Rp134,25 milyar, atau bertambah sebesar Rp.121,62 milyar, karena dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2008, target peneriimaan pembiayaan, khususnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu, telah dianggarkan sebesar Rp.12,62 milyar.

Selanjutnya mengenai penambahan alokasi anggaran, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, dapat kami jelaskan, bahwa penambahan alokasi anggaran tersebut, didistribusikan untuk beberapa kegiatan yang cukup mendesak, dan belum dapat tertampung dalam APBD murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2008. Hal ini mengingat keterbatasan sumber penerimaan, untuk membiayai seluruh rencana pengeluaran daerah yang merupakan kebutuhan.

Adapun perubahan alokasi belanja daerah dapat dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, terkait secara langsung, merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung, semula dianggarkan sebesar Rp.563,45 milyar, pada perubahan bertambah sebesar Rp.38,55 milyar, atau meningkat sebesar 6,84 %, sehingga menjadi sebesar Rp.602,13 milyar. Perubahan belanja tidak langsung, terjadi pada komponen:

- 1) Belanja Pegawai untuk membiayai gaji PNS, Tunjangan Struktural, dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.
- 2) Belanja Bantuan Sosial, yang sebagian besar diperuntukan Bantuan Pembinaan Pendidikan.
- 3) Belanja Hibah.

b. Belanja Langsung

Sedangkan Belanja langsung, merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya. Belanja langsung, semula dianggarkan sebesar Rp.738,37 milyar, pada perubahan bertambah sebesar Rp.116,28 milyar, atau meningkat 15,75 %, sehingga menjadi sebesar Rp.854,65 milyar. Perubahan belanja langsung, dialokasikan pada beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, terutama terhadap kegiatan yang dinilai sangat strategis, dan prioritas untuk segera ditangani.

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan, semula dianggarkan sebesar Rp.12,62 milyar, pada perubahan bertambah sebesar Rp.121,68 milyar, atau meningkat 963,60 %, sehingga menjadi sebesar Rp. 134.25 milyar.

Disisi Pengeluaran Pembiayaan semula tidak dianggarkan, pada perubahan dianggarkan sebesar Rp.21,50 milyar, yang diperuntukkan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar, sebesar Rp.20,00 milyar, dan Asuransi Kerugian Daerah (ASKRIDA) sebesar Rp.1,50 milyar.

Penyertaan Modal pada Bank Kalbar, dan Asuransi Kerugian Daerah (ASKRIDA) sebagaimana dimaksud, dalam pelaksanaannya, harus didasari dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan, Modal.

Oleh karena itu, telah dipersiapkan Raperda tentang Penyertaan Modal dimaksud.

Hadirin peserta Sidang yang saya hormati,

Selanjutnya mengenai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009, yang merupakan implementasi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009, KUA dan RKPD Tahun 2009, merupakan tahun pertama pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013, yang memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya. Selain itu, KUA juga menjelaskan mengenai kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Salah satu asumsi yang akan dilakukan, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2009 ini, adalah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, oleh karena itu pembangunan difokuskan kepada wilayah perkotaan dan perdesaan dengan skala kawasan, terutama pada kawasan sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah Kalimantan Barat terus berupaya, untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan yang bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan dari pemerintah pusat (Bagi Hasil, DAU, DAK), dan penerimaan lainnya. Oleh karena itu kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan PAD
2. Peningkatan Penerimaan sumber pendanaan dana penimbangan
3. Peningkatan kesadaran masyarakat
4. Peningkatan kualitas pelayanan
5. Peningkatan koordinasi pungutan

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka target pendapatan daerah yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2009 diperkirakan sebesar Rp. 1.426,4 trilyun sampai Rp.1.558,21 trilyun.

Di sisi belanja, berbagai langkah kebijakan yang dilakukan di berbagai bidang yang mempengaruhi perekonomian Kalimantan Barat, maka arah kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2009, tetap masih di titik beratkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat serta alokasi anggaran belanja untuk menunjang fungsi pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Oleh karena itu, dalam kebijakan pembelanjaan, pada Tahun Anggaran 2009, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ, tanggal 8 September 2008 perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya, untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut, telah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009, untuk pendanaan pada fungsi pendidikan, yang diaplikasikan pada kelompok Belanja Tidak Langsung, berupa Gaji PNS pada Dinas Pendidikan, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk fungsi Pendidikan, Hibah untuk fungsi Pendidikan, Bantuan Sosial seperti bea siswa untuk masyarakat. Dan pada Belanja Langsung dialokasikan berupa belanja untuk kegiatan-kegiatan fungsi pendidikan baik berupa barang dan jasa maupun belanja modal pada Dinas Pendidikan dan SKPD terkait.

Dari jumlah besaran pendapatan tersebut di atas yang dialokasikan dalam 2 (dua) kelompok belanja dimaksud, yaitu untuk Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp.716,18 milyar. Sedangkan untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 842,03 milyar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk kegiatan yang dinilai strategis dan prionitas.

Pembiayaan Daerah

Dalam penetapan KUA Tahun Anggaran 2009 untuk sementara belum dapat ditentukan seberapa besar jumlah dari pembiayaan daerah, karena pembiayaan merupakan pemanfaatan surplus dan atau menutup defisit anggaran.

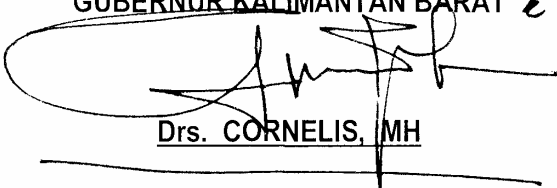
Demikianlah beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Secara tulus, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang telah bersedia melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara objektif dan mendalam, terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, maupun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009 yang kami ajukan, sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah, pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa dan negara, dan semoga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 yang kita setujui bersama, dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan ini, benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat Kalimantan Barat yang kita cintai.

Atas perhatian dan kesabaran Saudara-saudara, dalam mengikuti penjelasan ini, kami ucapkan terima kasih.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pontianak, 25 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ↙

Drs. CORNELIS, MH